

UPAYA MENINGKATKAN IPM BIDANG PENDIDIKAN MELALUI KOLABORASI SEKOLAH DAN DUNIA USAHA DALAM PEMBELAJARAN EBCE MUATAN LOKAL KETERAMPILAN TINGKAT SLTP

Wahid Munawar¹

Abstrak:

Hasil penelitian menunjukkan persentase terbesar angka putus sekolah siswa ada di tingkat pendidikan dasar (SD dan SLTP). Di Jawa Barat, angka putus sekolah siswa SD dan SLTP cukup tinggi, sedangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan tergolong rendah. (Olah data Susenas, 2004). Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas/mutu hidup masyarakat Jawa Barat.

Pendidikan di tingkat dasar (SLTP) mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk dapat hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan pendidikan ini menuntut adanya muatan pembelajaran *life skills* pada tiap mata pelajaran. Kurikulum Muatan Lokal (KML) keterampilan memiliki peluang untuk diisi muatan *life skill* karena KML keterampilan bertujuan membekali siswa agar memiliki keterampilan untuk hidup dan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan.

Pelaksanaan pendidikan keterampilan memerlukan fasilitas yang cukup besar, tidak semua sekolah mampu menyediakannya, disinilah pentingnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pendidikan.

Upaya memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah yang terkait dengan IPM dapat dilakukan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pembelajaran di sekolah (SLTP). Model pembelajaran alternatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan sekolah adalah model pembelajaran berbasis karir/kerja (Experience Based Career Education)

Pembelajaran berbasis karir berbeda dengan pembelajaran klasikal yang bersifat verbalistis. Pada pembelajaran berbasis karir, siswa diberi keterampilan dasar oleh guru dan sumber belajar (masyarakat dan dunia usaha). Sekolah bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilakukan di sekolah dan sekitar sekolah. Pembelajaran keterampilan disesuaikan dengan minat siswa yang terkait dengan pekerjaan, dan menggunakan sumber belajar di sekitar sekolah (petani, peternak, pabrik, jasa bengkel, rumah produksi, industri, dan unit usaha lainnya). Perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa dengan model belajar keterampilan muatan lokal adalah siswa mampu membuat produk sederhana dan memasarkannya, serta menunjukkan kemampuan/kebiasaan yang terkait dengan kerja.

Pembelajaran berbasis karir ini di Yogyakarta terbukti mampu membekali siswa tingkat pendidikan dasar dengan kompetensi menulis, membaca, berhitung, berkomunikasi, dan keterampilan sederhana yang terkait dengan kerja dan menghasilkan pendapatan. Manfaat utama pembelajaran berbasis karir adalah masyarakat menganggap bahwa pendidikan bermakna bagi masa depan anaknya dan siswa merasa senang bersekolah. Dengan demikian kolaborasi pemerintah daerah-sekolah-dunia usaha dalam pendidikan berbasis karir muatan lokal keterampilan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

¹ Dr. Wahid Munawar adalah dosen pada Jurusan Pend. Teknik Mesin FPTK UPI

Latar pendidikan: pernah kuliah di: S1 Mesin IKIP Bandung, S2 Mesin ITB, S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNY, S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNJ. *Alamat rumah:* Jl. Baros-Bp. Ampi 5F Cimahi 40521; *Telepon:* 08122122058; *e-mail:* awar @bdg.centrin.net.id

A. Pendahuluan

Kriteria pembangunan manusia dalam LPMI yang diadopsi dari *Human Development Report* (HDR) yang diterbitkan UNDP sejak tahun 1990, intinya ada tiga hal, yaitu: akses pada pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan sanitasi, serta usia harapan hidup. Namun demikian, kriteria HDR-UNDP terus berkembang dan menciptakan kriteria baru seperti: indeks pembangunan berkaitan dengan gender, hak asasi manusia, *millenium development goals*, dan kemerdekaan berbudaya.

Tokoh yang berjasa menciptakan kriteria inti untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) adalah Dr. Mahbub ul-Haq (1934-1998). Menurut tokoh IPM ini, inti dari pembangunan manusia adalah memperbesar pilihan-pilihan manusia di semua bidang kehidupan.

Salah satu faktor yang terkait dengan peluang manusia dalam hidupnya adalah pendidikan. Banyak pengamat pengembangan sumber daya manusia percaya sumber sekaligus kunci dari permasalahan sumber daya manusia adalah pendidikan, karena hal hakiki dari pendidikan adalah perhatian pada martabat pribadi manusia (pedagogi dimaknai *education cura personalis est*). Pada pedagogi pribadi manusia menjadi inti pendidikan itu sendiri.

Kualitas sumberdaya manusia Indonesia secara umum masih jauh tertinggal, sebagaimana ditunjukkan UNDP lewat Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) yang masih di level 111 pada tahun 2004, termasuk rendah diantara negara ASEAN. Indonesia termasuk kriteria “menengah” dalam pembangunan manusia, jauh dibawah Singapura (peringkat 25, termasuk kriteria tinggi dalam pembangunan manusia), Malaysia, Thailand dan Filipina termasuk peringkat 59, 76 dan 83 termasuk kriteria menengah. Demikian pula dengan propinsi Jawa Barat, belum mampu memberi kontribusi untuk peningkatan IPM Indonesia. Baru pada tahun 2010, Jawa Barat mentargetkan tingkat IPM mencapai 80 dari skor IPM 69 (pada tahun 2005).

Rendahnya IPM Indonesia terkait dengan alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan Indonesia yang tercatat sebagai terendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Rendahnya alokasi anggaran

pendidikan berdampak pula pada akses dan mutu/kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan, salah satu diantaranya diukur dari partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan.

Pendidikan di Indonesia sekarang ini, berjalan dengan verbalistik dan berorientasi hanya kepada penguasaan mata pelajaran. Pengamatan terhadap praktek pendidikan formal, menunjukkan bahwa pendidikan terfokus pada peserta didik menguasai informasi yang terkandung pada mata pelajaran, kemudian dilakukan evaluasi tingkat pencapaian penguasaan peserta didik. Hasilnya berupa angka atau huruf yang menjadi simbol penguasaan materi pelajaran. Tidak pernah terpikir bagaimana keterkaitan materi pelajaran dengan pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik kelak dalam hidupnya. Pendidikan seakan tidak terkait dengan kehidupan peserta didik saat ini dan yang akan datang. Jika ditanya pada peserta didik, mengapa dia belajar matematika, sains, teknologi, keterampilan, budaya dan lainnya, mereka tidak tahu jawabannya, atau bilapun menjawab; “itu mata pelajaran yang ada di sekolah”. Akibatnya pendidikan menjadi tidak bermakna bagi peserta didik/siswa.

Selain itu, situasi di Indonesia menunjukkan adanya budaya belajar yang sangat berorientasi pada status, bukan pencapaian hasil belajar. Dengan demikian, pendidikan dilihat sebagai wahana untuk mencapai status yang lebih tinggi, secara ekonomis atau sosial. Belum banyak anggota masyarakat yang dapat menghargai proses belajar sebagai upaya transfer dan transformasi ilmu pengetahuan. Budaya feodal menyebabkan siswa cenderung pasif dalam interaksi belajar.

Faktor pembelajaran yang pasif, represif, tidak kreatif, dan tidak bermakna, merupakan penyebab sektor pendidikan kurang memberi nilai tambah bagi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada sektor pendidikan adalah perlunya sistem pendidikan yang bermakna dan terbarukan bagi peserta didik, yaitu sistem pendidikan yang diharapkan dapat membudayakan pembelajaran bermakna,

mengeksplorasi kreativitas dan kemandirian, serta membekali kecakapan/kompetensi pada peserta didik yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Dengan pendidikan yang bermakna, diharapkan terjadinya kesadaran dan keterlibatan masyarakat pada sektor pendidikan, sehingga terjadi peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang berimplikasi pada peningkatan IPM (karena indikator IPM salah satunya adalah akses pada pendidikan).

Pendidikan bermakna dan peningkatan IPM perlu melibatkan semua unsur masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Gubernur Jawa Barat, bahwa peningkatan IPM merupakan tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, dibutuhkan kerjasama yang sinergis baik antar tingkat pemerintah, maupun dengan berbagai *stake holders*. (Pikiran Rakyat, 3 April 2006)

Upaya meningkatkan IPM pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, sekolah dan dunia usaha (industri dan sektor usaha formal dan informal). Bentuk kolaborasi pemda-sekolah-dunia usaha pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui inovasi pembelajaran alternatif di tingkat pendidikan dasar dan menengah, seperti; magang wirausaha, *dual system*, praktek kerja-industri, sekolah produksi, dan model pembelajaran lain yang mengoptimalkan peran dunia usaha dalam akses, pemerataan, efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Makalah ini membahas kolaborasi pemda-sekolah-dunia usaha dalam bentuk pembelajaran berbasis pengalaman karir/kerja (*Experinice Based Career Education/EBCE*) muatan lokal keterampilan di SLTP. Pembelajaran berbasis karir (EBCE) berbeda dengan pembelajaran klasikal yang bersifat verbalistis. Pada pembelajaran berbasis EBCE magang, siswa diberi keterampilan dasar oleh guru dan sumber belajar (masyarakat dan dunia usaha). Sekolah bekerjasama dengan dunia usaha dan pemda dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilakukan di sekolah dan sekitar sekolah. Pembelajaran keterampilan disesuaikan dengan minat siswa yang terkait dengan pekerjaan, dan menggunakan sumber belajar di sekitar sekolah (petani, peternak, pabrik, jasa bengkel, rumah produksi, industri, usaha sektor informal dan lainnya).

Perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa dengan model belajar keterampilan muatan lokal EBCE adalah siswa mampu membuat produk sederhana dan memasarkannya, serta menunjukkan kemampuan/kebiasaan yang terkait dengan kerja. Dengan model pembelajaran EBCE, siswa minimal mampu membaca, menulis, berhitung dan berwirausaha.

Implikasi yang nyata dari pembelajaran EBCE adalah pendidikan dasar (SLTP) dapat diakses oleh siswa usia sekolah (wajib belajar pada pendidikan dasar), dunia usaha berperan aktif pada efisiensi dan efektivitas pendidikan karena menjadi sumber belajar bagi siswa dan sekolah, terjadinya pemerataan kesempatan belajar karena sekat pemisah antara sekolah dan sumber belajar di masyarakat dapat dieliminir. Dengan demikian diharapkan terjadinya peningkatan IPM sektor pendidikan.

(Isi makalah yang lengkap dapat dilihat pada proceeding KOPERTIS Wilayah IV Jawa Barat-Banten tahun 2006)